

PERILAKU POLITIK MUHAMMADIYAH DALAM RELASI DENGAN NEGARA PADA ERA REFORMASI

POLITICAL BEHAVIOR OF MUHAMMADIYAH AND ITS RELATION TO THE STATE DURING THE REFORMATION ERA

Suwarno

Program Studi Pendidikan Sejarah
FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRACT

This research aims at revealing the political paradigm of Muhammadiyah and describing the political behavior of Muhammadiyah during the administration of B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, and Megawati Soekarnoputri. This research is a social study employing the phenomenological approach and the descriptive-qualitative analysis. The outcome of the study is as follows. First, Muhammadiyah has been applying the cultural paradigm, called Strategi Dakwah Kultural (cultural propagation strategy). Second, the political behavior of Muhammadiyah during the Habibie Administration tends to be accommodative and subordinate; the same is true during the administration of Abdurrahman Wahid. The true characteristics of its political behavior--standard, co-operative, and critical--begin to be evident only during the administration of Megawati Soekarnoputri.

Kata Kunci : *Muhammadiyah, paradigma politik, perilaku politik, dan reformasi.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Islam di Indonesia sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, tentu tidak terlepas dari membahas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi Islam terbesar yang mewakili dua kutub berbeda. Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 mewakili kutub Islam modernis, sedangkan NU yang didirikan pada 1926 mewakili kutub Islam tradisional (Liddle, 1996: 73). Kajian ini hanya terfokus pada Muhammadiyah.

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang lebih berorientasi dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Hal ini berarti, sejak awal, Muhammadiyah berpijak pada paradigma sebagai gerakan kultural, dan bukan paradigma gerakan struktural. Namun, dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Muhammadiyah pernah tergoda --sekalipun tidak secara langsung-- untuk bergerak pada level paradigma gerakan struktural, misalnya ketika Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Partai Islam Masyumi dalam tahun 1950-an.

Dengan demikian, perilaku politik Muhammadiyah menarik untuk dicermati karena kerap terjadi tarik ulur antara keinginan mengikuti paradigma struktural atau tetap berpijak pada paradigma kultural. Keadaan yang semacam ini ikut memberikan warna pada pernik-pernik perjalanan sejarah (terutama sejarah politik) umat Islam Indonesia, karena Muhammadiyah merupakan salah satu bagian dari mata rantai umat Islam Indonesia. Padahal, mengutip Uhlin (1998: 67), untuk memahami politik Indonesia perlu --kalau tidak mau dikatakan harus-- mempertimbangkan faktor Islam dan umatnya.

Watak dasar Muhammadiyah dalam merespons realitas politik yang ada, relatif lebih mengedepankan sikap yang moderat, kooperatif, dan tidak menjadi oposan. Menurut Maarif (1987: 66) dalam menghadapi setiap gelombang perubahan politik, Muhammadiyah selalu berhati-hati dan bersikap lentur. Fenomena inilah yang menyelamatkan Muhammadiyah dari sikap konfrontatif dengan kekuasaan manapun, baik pada masa kolonial (penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang) hingga masa Orde Baru yang otoritarian. Hal ini berarti perilaku politik Muhammadiyah lebih mengedepankan sikap yang moderat, meskipun tidak meninggalkan sikap kritis.

Namun pada saat menjelang runtuhnya rezim Orde Baru yang otoritarian dan antidemokrasi ketika kebijakan politik rezim tersebut cenderung akomodatif kepada umat Islam, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Dr. H. M. Amien Rais justru berperilaku politik seolah-olah menjadi “oposan” terhadap rezim Orde Baru. Fenomena ini berangkat dari tanggung jawab moral Muhammadiyah, khususnya Amien Rais selaku Ketua PP Muhammadiyah, untuk ikut memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, dengan melaksanakan prinsip dakwah *amar ma'ruf wa nahi munkar*.

Tampilnya Amien Rais dalam spektrum politik nasional selaku penggagas dan tokoh utama gerakan reformasi yang ditulangi oleh para mahasiswa, berhasil membawa perubahan dan “memaksa” Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Sejak itulah, secara simbolik, rezim Orde Baru runtuh, dan diganti oleh Orde Reformasi hingga sekarang.

Setelah rezim Orde Baru tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi yang dapat dipandang prodemokrasi, tentu amat menarik untuk mengamati perilaku politik Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Prof. Dr. A. Syafii Maarif. Hal yang utama adalah mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab moral Muhammadiyah guna mengatasi krisis multidimensi yang masih terus berlangsung hingga kini (2004), saat penelitian ini dikerjakan.

Pengkajian ini akan terfokus pada empat (4) masalah, yakni:

1. paradigma politik yang dianut oleh Muhammadiyah,
2. perilaku politik Muhammadiyah (dalam relasinya dengan negara) pada masa Presiden B.J. Habibie (Mei 1998-Oktober 1999),
3. perilaku politik Muhammadiyah (dalam relasinya dengan Negara) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001),
4. perilaku politik Muhammadiyah (dalam relasinya dengan Negara) pada masa Presiden Megawati Sukarnoputri (Juli 2001-Oktober 2004).

Apabila politik dipahami dengan mengikuti pendapat David Easton, “bagaimana mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat bagi masyarakat” (dikutip dari Gaffar dalam Rais, 1995: 12), maka perilaku politik Muhammadiyah dapat dipahami sebagai tindakan Muhammadiyah dalam menyebarluaskan nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah. Tindakan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kultural, khususnya sistem nilai dan norma, yang mempengaruhi motivasi dan kemudian membentuk sikap serta mendorong tindakan sebagai suatu perilaku politik.

Dalam Muhammadiyah, aspek-aspek kultural berupa sistem nilai dan norma yang mendorong Muhammadiyah untuk berperilaku politik dapat disebut sebagai “budaya politik Muhammadiyah”. Dapat diamati bahwa dalam setiap pergantian pada pucuk pimpinan (PP) Muhammadiyah, terdapat beberapa variasi dari aplikasi budaya politik Muhammadiyah.

Lebih jauh, perilaku politik juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan yang berimbas kepada publik. Kegiatan semacam ini dilakukan secara simultan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, yang dalam ilmu politik disebut sebagai suprastruktur politik, sedangkan masyarakat melakukan fungsi-fungsi politik yang dinamakan infrastruktur politik (Surbakti, 1992: 31).

Dalam menjalankan fungsi infrastruktur politik, sebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan yang non-politik, maka yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah --sejauh ini-- adalah berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan (*an interest group*). Dalam situasi tertentu yang genting, misalnya menjelang keruntuhan rezim

Orde Baru, Muhammadiyah bersama eksponen gerakan reformasi lainnya yang ditulangpungungi oleh para mahasiswa, dapat memainkan peran sebagai sebuah kelompok penekan (*a pressure group*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian sosial, yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosial.

Dalam pengumpulan data dipergunakan teknik dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Teknik dokumentasi (yang sama dengan studi dokumentasi dalam metode sejarah) dimaksudkan untuk menggali data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, yang tersimpan di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Studi pustaka dilakukan untuk mencari dan memperbandingkan bahan-bahan pustaka yang relevan sebagai pendukung penelitian. Dalam kaitan ini, penulis banyak bergantung pada majalah Suara Muhammadiyah, sebagai organ resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Sementara itu, wawancara mendalam --karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana-- hanya dapat dilakukan dengan Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. A. Syafii Maarif. Wawancara dimaksudkan untuk mengungkap data yang tidak terdapat pada dokumen dan bahan pustaka lainnya.

Selain blangko dokumentasi yang disiapkan dalam penerapan teknik dokumentasi, dalam studi pustaka penulis memakai alat berupa kartu catatan bibliografis. Pada wawancara mendalam, penulis mendasarkan pada sebuah pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelum wawancara berlangsung guna mendapatkan gambaran yang lengkap tentang topik yang diteliti (Irianto dan Burhan Bungin, dalam Bungin, 2001: 110).

Data-data yang sudah terkumpul pada langkah pertama (pengumpulan data), kemudian disederhanakan pada langkah reduksi data menjadi pokok-pokok temuan penelitian tentang fenomena penelitian. Setelah itu, pada langkah penyajian data, pokok-pokok temuan penelitian disajikan secara deskriptif-naratif.

Proses berikutnya adalah langkah terakhir berupa penarikan simpulan atau verifikasi. Pada langkah ini, pokok-pokok temuan penelitian yang telah disajikan secara deskriptif-naratif diberi makna melalui interpretasi secara logis yang didasarkan pada pendekatan fenomenologis, yakni upaya memahami fenomena yang diteliti, dan selanjutnya penarikan simpulan (Ridjal, dalam Bungin, 2001: 95-99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Politik Muhammadiyah

Dalam pandangan Muhammadiyah, sebagaimana terungkap lewat keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969, politik dan kekuasaan merupakan bagian dari alat perjuangan dan kegiatan dakwah Islam. Saluran yang ditempuh untuk itu adalah melalui parpol. Tidak heran bila ketika itu Muhammadiyah terlibat membidani kelahiran Parmusi dalam tahun 1968. Harapan Muhammadiyah dengan hadirnya Parmusi, sebagai saluran politik resmi Muhammadiyah, adalah Muhammadiyah dapat menempatkan orang-orang atau wakil-wakilnya di dalam pemerintahan (kekuasaan) sehingga dakwah Islam menjadi lancar. Akan tetapi, harapan tersebut tidak terpenuhi karena adanya intervensi pemerintah Orde Baru.

Pandangan Ketua PP Muhammadiyah periode sekarang, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, tentang relasi Muhammadiyah dan negara kiranya dapat mewakili pandangan Muhammadiyah. Menurut beliau, negara sebagai muara dari semua kepentingan politik dan kekuasaan, hanya merupakan:

“Alat penting untuk mencapai tujuan dakwah Islam berupa terciptanya suatu masyarakat utama atau masyarakat Islami dalam koridor keridhaan Illahi. Masyarakat itu haruslah adil, terbuka dan menghargai pluralisme pandangan hidup dan aspirasi politik, tetapi semua pihak wajib tunduk kepada ketentuan konstitusi yang telah disepakati bersama. Bermain di luar konstitusi pasti mengandung anarkisme dan konflik berkepanjangan yang dapat melumpuhkan masyarakat secara keseluruhan (Maarif, dalam Hamid, dkk., 2000: 9)”.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, politik dan kekuasaan sebagai bangunan pokok dari negara merupakan alat dakwah yang penting atau utama guna mewujudkan masyarakat Islami yang didasarkan pada nilai keadilan, keterbukaan, komitmen pada konstitusi, dan hukum.

Pandangan Muhammadiyah mengenai hubungan antara dakwah, politik dan kekuasaan dapat dilihat pada Khittah Muhammadiyah, yang dihasilkan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah di Depansar tahun 2002, terutama pada butir I dan II. Mengacu pada butir I, dalam pandangan Muhammadiyah, politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang harus dibingkai dan diwarnai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, bagi Muhammadiyah, politik masih menjadi bagian dari alat atau sarana bagi dakwah Islam, terutama dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Pada butir II, Muhammadiyah memandang bahwa kekuasaan dapat dipengaruhi melalui dua hal, yaitu politik praktis yang umumnya diperjuangkan oleh parpol, dan pengembangan/pemberdayaan masyarakat yang lebih cocok dijalankan oleh gerakan sosial-keagamaan seperti Muhammadiyah.

Menurut pemikiran Ketua PP Muhammadiyah, A. Syafii Maarif, perilaku politik Muhammadiyah harus selalu dilandasi oleh akhlak mulia dan moral yang tinggi. Perilaku politik yang demikian merupakan bagian dari dakwah Muhammadiyah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang merupakan bangunan pokok budaya politik Muhammadiyah. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan bangsa dan kepentingan orang banyak (Maarif, 2000: 95).

“Dakwah Kultural untuk Pencerahan Bangsa” merupakan tema Sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar bulan Januari 2002. Menurut Ketua PP Muhammadiyah, A. Syafii Maarif, tema tersebut merupakan paradigma baru dan komitmen Muhammadiyah sebagai bagian dari anak bangsa guna membantu mengatasi kondisi bangsa Indonesia yang tengah tercabik-cabik oleh krisis multidimensi (Suara Muhammadiyah, No. 2, Th. Ke-87, 16-31 Januari 2002).

Lebih jauh, menurut Maarif, dakwah kultural dapat dipahami sebagai dakwah mengikuti filsafat garam bukan mengikuti filsafat gincu. Mengikuti filsafat garam, berarti Muhammadiyah lebih menonjolkan corak dan warna substansial dari nilai-nilai ajaran Islam. Bila mengikuti filsafat gincu, Muhammadiyah terlalu menonjolkan bentuk, sementara substansinya belum tentu Islami. Dalam pandangan Muhammadiyah, bentuk penting, tetapi substansi atau isi jauh lebih penting (Suara Muhammadiyah, No. 2, Th. Ke-87, 16-31 Januari 2002).

Dalam urusan negara, dakwah kultural sejatinya dapat dipandang sebagai kelanjutan dari “Politik Adiluhung” (*High Politics*), politik kelembagaan Muhammadiyah yang dicanangkan sejak Mukhtar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh bulan Juni 1995. *High Politics* ini telah dipraktikkan oleh Amien Rais (Ketua PP Muhammadiyah, 1994-1998) dengan perilaku politik yang sangat kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan negara (terutama KKN). *High Politics* itulah yang mengantarkan Amien Rais sebagai salah satu tokoh utama atau kunci gerakan Reformasi mahasiswa yang berhasil meruntuhkan rezim otoritarian Orde Baru pada bulan Mei 1998.

Dengan demikian, paradigma politik yang dianut oleh Muhammadiyah tetap berpijak pada paradigma kultural, meskipun, dengan nama atau istilah yang berbeda-beda. Dalam masa kepemimpinan Amien Rais (1995-2000) paradigma itu disebut dengan istilah *High Politics*, sedangkan pada masa kepemimpinan A. Syafii Maarif (2000-2005) dikenal dengan nama Dakwah Kultural.

Perilaku Politik Muhammadiyah Pada Masa Presiden B. J. Habibie

B. J. Habibie menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI karena tekanan politik (*political*

pressure) yang sangat besar dari gerakan reformasi yang ditulang-punggungi oleh para mahasiswa, pemuda, dan tokoh intelektual seperti Amien Rais. Mundurnya Soeharto, secara simbolik, menandai runtuhnya rezim Orde Baru yang otoritarian. Naiknya Habibie yang sebelumnya menjadi Wakil Presiden agak bersifat kontroversial. Artinya, pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menamakan diri sebagai Kabinet Reformasi tidak memiliki legitimasi politik yang memadai.

Latar belakang B.J. Habibie sebagai mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membuat beliau dapat dipandang sebagai personifikasi kekuatan politik Islam. Tidak heran bila beliau banyak mendekati kekuatan politik Islam, yang tercermin pada parpol berasas Islam atau berbasis massa Islam, seperti: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai saluran politik resmi warga Nahdliyin (NU) cenderung lebih dekat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karena Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selaku Deklarator PKB memiliki hubungan pribadi yang sangat erat dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan yang pro gerakan reformasi menyambut baik pengunduran diri Presiden Soeharto dan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Sebagaimana dinyatakan oleh A. Syafii Maarif, menyambut kemenangan gerakan reformasi sebagai “kemenangan rakyat” (Suara Muhammadiyah, No. 11, Th. ke-83, 1-15 Juni 1998: 14).

Kendatipun pemerintahan telah berada di tangan Presiden B.J. Habibie, yang dapat dianggap sebagai representasi pemerintahan kaum santri, dan Muhammadiyah cukup terakomodasi dalam kabinet, di antaranya Prof. A. Malik Fajar yang menempati jabatan Menteri Agama, Muhammadiyah tidak mendukung Habibie tanpa *reserve*. Seperti dinyatakan oleh Amien Rais, ketika masih menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah sebelum 23 Agustus 1998, beliau akan tetap berada di luar kekuasaan untuk terus melakukan kritik dan koreksi. Amien Rais juga mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk berjuang lebih keras guna mewujudkan reformasi total di segala bidang kehidupan dan ikut membantu mengatasi krisis ekonomi (Suara Muhammadiyah, No. 13, Th. ke-83, 1-15 Juli 1998: 6).

Dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang pada bulan Juli 1998, Amien Rais mengemukakan dua agenda Muhammadiyah pasca Soeharto. Pertama, agenda internal, seperti: persiapan muktamar tahun 2000, pembinaan kader, peningkatan kerjasama antarortom, peningkatan amal usaha baik secara kuantitas maupun kualitas, serta peningkatan semangat berinfak. Kedua, agenda eksternal, meliputi : (1) bergabung dengan kekuatan reformis untuk mewujudkan reformasi total, (2) menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi langkah-langkah Muhammadiyah ke depan, (3) melaksanakan prinsip dakwah *amar ma'ruf* dan

nahi mungkar di segala bidang kehidupan, (4) membangun jaringan kerjasama baik dalam skala nasional maupun internasional secara transparan, serta (5) memelihara kerjasama yang baik dengan pemerintah, termasuk dengan ABRI/TNI, dalam rangka mencapai cita-cita proklamasi bangsa Indonesia (Suara Muhammadiyah, No. 16, Th. ke-83, 16-31 Agustus 1998: 6).

Setelah sidang tanwir tersebut, tepatnya pada 23 Agustus 1998, Amien Rais mengundurkan diri dari jabatan Ketua PP Muhammadiyah lantaran mau berkonsentrasi pada panggung politik praktis, dengan menjadi Ketua Umum PAN, dan belakangan (sejak 1 Oktober 1999) menjadi Ketua MPR RI. Pengganti Amien Rais selaku Ketua PP Muhammadiyah adalah A. Syafii Maarif, yang oleh Ichlasul Amal dijuluki sebagai “benteng moral”. Pengunduran diri Amien Rais di atas, berarti beliau menghargai Khittah Perjuangan Muhammadiyah.

Menjelang Sidang Umum (SU) MPR bulan Oktober 1999, pemerintahan Habibie dihadapkan pada kesulitan yang serius untuk mempertahankan pertanggungjawabannya di depan SU MPR. Selaku mantan orang kepercayaan Presiden Soeharto, Habibie tidak dapat mengelak dari beban sejarah rezim Orde Baru yang penuh dengan dosa-dosa sosial dan korup. Tidak kurang dari 30 % uang negara telah disalahgunakan lewat KKN oleh kroni-kroni Soeharto. Para koruptor bebas berkeliaran. Belum lagi dengan terjadinya kasus Bank Bali yang mempertaruhkan reputasi teman-teman dekatnya dalam kaukus Iramasuka, seperti A.A. Baramuli dan Tanri Abeng. Demikian pula, soal jajak pendapat yang menawarkan opsi otonomi luas atau merdeka kepada rakyat Timor Timur, dan yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan, sehingga Timor Timur pada akhirnya lepas dari negara NKRI. Kemudian, ketegangan-ketegangan di antara pendukung Megawati dengan pendukung Habibie, semakin menambah ruwet persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan B.J. Habibie (Suharsono, 1999: 71).

Dalam suasana semacam itu, muncul terobosan cerdas dari para politisi muslim yang berasal dari parpol berbasis Islam dan berbasis massa Islam untuk menggagas kekuatan Poros Tengah. Ternyata gagasan Poros Tengah bagaikan “bola salju” (*snowball*) yang terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Apalagi ketika Amien Rais memunculkan wacana untuk mencalonkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI untuk menggantikan Habibie.

Muhammadiyah sangat mendukung munculnya wacana dan kekuatan Poros Tengah, sebagaimana terbukti ketika memfasilitasi pengajian akbar hasil kerjasama antara Gerakan Pemuda (GP) Anshar dan Pemuda Muhammadiyah, pada akhir September 1999 di Gedung PP Muhammadiyah Jl. Menteng Raya Jakarta. Dalam kesempatan itu, Gus Dur menyatakan bahwa pencalonan dirinya oleh Amien Rais merupakan amanah yang tidak bisa ditolak karena sudah didasarkan pada penelitian yang panjang, cermat, rasional, dan niat baik (Suharsono, 1999: 80-81).

Tanggal 1 Oktober 1999, SU MPR mulai digelar. Poros Tengah mulai menunjukkan kekuatan politiknya pada 3 Oktober 1999 dengan terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR melalui pemungutan suara yang cukup ketat. Amien Rais memperoleh 305 suara, sedangkan lawannya, Mathori Abdul Djilil, mendapat 279 suara (Uchrowi, 2004: 249; bdk. Suharsono, 1999: 106). Dalam SU MPR itu pula, pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak oleh 355 anggota MPR, sedangkan yang menerima hanya 322 anggota MPR (Uchrowi, 2004: 262). Penolakan itu berarti masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir.

Perilaku Politik Muhammadiyah Pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid

Terpilihnya K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999 tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh Poros Tengah. Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, setelah memenangkan pemungutan suara menghadapi Megawati (Gus Dur mendapat 373 suara, sementara Megawati 313 suara). Kemenangan itu merupakan puncak keberhasilan kekuatan politik Poros Tengah (Suharsono, 1999: 131).

Di samping itu, dukungan Amien Rais kepada Gus Dur secara konsisten ikut menentukan keberhasilan Gus Dur menjadi Presiden RI. Sebenarnya masih ada kesempatan bagi Amien Rais untuk mencalonkan diri pada pagi hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Akan tetapi, Amien Rais tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sebuah sikap ksatria (*gentlement*) yang didukung oleh Ketua PP Muhammadiyah, A. Syafii Maarif, yang pada saat itu menemani sahabatnya (Amien Rais) menginap di Hotel Mulia kamar nomor 3212. Salah satu alasan Amien Rais bersikap konsisten mendukung pencalonan Gus Dur sebagai Presiden RI adalah hubungan baik antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah (Uchrowi, 2004: 264).

Terpilihnya Gus Dur secara demokratis sebagai Presiden RI menimbulkan harapan yang cukup besar di kalangan kekuatan politik Islam yang tergabung dalam Poros Tengah bahwa dia akan memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan umat Islam. Hal itu tercermin dari keterlibatan para ketua parpol berasas maupun berbasis massa Islam (seperti PPP, PAN, PBB, PK, dan PKB) dalam proses penentuan komposisi kabinet baru (Cipto, 2000: 291).

Dalam kabinet atau pemerintahan Gus Dur, Muhammadiyah cukup terwakili dengan naiknya Prof. Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Sama seperti masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang singkat (sekitar 16 bulan lebih), masa pemerintahan Presiden Gus Dur juga tidak terlalu lama (kira-kira 21 bulan). Perilaku politik Muhammadiyah secara kelembagaan tampak kooperatif, cukup kritis, tetapi ada kesan lebih akomodatif karena kedua Presiden RI tersebut sama-sama merupakan representasi kekuatan politik Islam.

Thohari (Suara Muhammadiyah, No. 05, Th.K3-88, 1-15 Maret 2003: 38-39) mengemukakan sebuah analisis yang sangat menarik berkenaan dengan masa pemerintahan kedua presiden yang berasal dari tokoh politik Islam dan hanya berjalan singkat tersebut. Menurutnya, sekali tokoh politik Islam tampil menjadi Presiden RI, ia seperti duduk di kursi panas (*hot seat*). Terdapat semacam ideologi penolakan atau resistensi yang keras terhadap tampilnya tokoh gerakan Islam sebagai Presiden di Indonesia. Penolakan atau resistensi itu, terutama ditunjukkan oleh kalangan militer, dengan semacam pembangkangan terhadap kedua tokoh Islam yang menjadi Presiden RI tersebut.

Pada masa Presiden Gus Dur, Muhammadiyah sukses menyelenggarakan Muktamar ke-44 di Jakarta pada bulan Juni 2000. Keputusan yang strategis dari muktamar tersebut, dalam bidang politik, adalah pengembangan peran politik Muhammadiyah. Sebagai gerakan sosial-keagamaan Islam yang tidak bergerak dalam politik praktis (*real politics*), peran yang paling pas bagi Muhammadiyah adalah menjalankan fungsi sebagai kelompok kepentingan (*interest groups*) yang efektif lewat berbagai saluran atau media atas dasar prinsip dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara (periksa Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-44, dalam Berita Resmi Muhammadiyah / BRM, No. 01 / 2000 – 2005: 40-41).

Salah satu masalah yang menjadi kendala besar bagi masa pemerintahan Presiden Gus Dur adalah hubungan antarpertai yang berasas Islam dan yang berbasis massa Islam dalam kaukus Poros Tengah diwarnai oleh corak permusuhan dua (2) kubu. *Pertama*, kubu partai Islam dan berbasis massa Islam yang tergabung dalam Fraksi Reformasi (PAN dan PK) di DPR dan MPR. *Kedua*, kubu PKB baik yang terdapat di DPR maupun di lembaga eksekutif. Hubungan kedua kubu tersebut, menurut sinyalemen Cipto (Suara Muhammadiyah, No. 1, Th. Ke-87, 1-15 Januari 2002: 46), dapat disebut sebagai *combative relationship*. Hasil dari relasi yang demikian adalah konfrontasi dari kedua kubu yang bertikai.

Eksplorasi politik Presiden Gus Dur atas basis massa pendukungnya dari kalangan Nahdliyin, yang terkadang menciptakan teror atau intimidasi, menjadi sumber malapetaka bagi hubungan antara NU dengan Muhammadiyah. Kendatipun, pada saat menjelang runtuhnya rezim Orde Baru dan masa Presiden B.J. Habibie, hubungan antara NU dengan Muhammadiyah sangat baik.

Hubungan NU dan Muhammadiyah sangat terpengaruh oleh proses dilengserkannya Gus Dur dari jabatan Presiden RI yang dimotori oleh kekuatan politik Poros Tengah dalam Sidang Istimewa (SI) MPR pada akhir Juli 2001, menyusul dua kali nota peringatan DPR yang tidak ditanggapi oleh Presiden Gus Dur. Alasan Poros Tengah, yang pada awalnya mendukung Gus Dur kemudian berubah memotori pelengseran Gus Dur, adalah kekecewaan Poros Tengah terhadap

kepemimpinan Gus Dur yang dipandang penuh dengan inkonsistensi dan akrobat politik.

Dalam analisis Gus Nur (2001: 17-24), kepemimpinan Gus Dur dinilai penuh dengan rapor merah, karena bersifat inkonsisten (*mencla-mencla*), cuek, arogan, namun pada saat yang sama mengidap ketakutan yang berlebihan (*paranoid*), dan tidak segan mengeluarkan teror kata-kata (sebagai fitnah atau *fait accompli*), serta (ancaman) gerakan massa untuk menghadapi kritik. Bagi Poros Tengah, terlalu riskan dan penuh resiko apabila tetap mempertahankan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4, dalam suasana krisis multidimensi yang belum dapat diatasi (Suwarno, 2002: 97).

Lengsernya Gus Dur dari kursi Presiden RI berakibat pada ketegangan hubungan antara massa NU dengan Muhammadiyah. Massa primordial Gus Dur tampaknya kurang dapat menerima pelengseran Gus Dur, dan menganggap Amien Rais (selaku Ketua MPR RI dan mantan Ketua PP Muhammadiyah) sebagai biang keladinya. Akibatnya, mereka melakukan perusakan terhadap fasilitas amal usaha (sekolah-sekolah) Muhammadiyah seperti tampak di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untungnya, konflik horisontal antara massa NU dengan massa Muhammadiyah dapat diredam, terutama karena kedewasaan massa Muhammadiyah yang lebih rasional, sehingga tidak menanggapi sikap emosional massa NU.

Pertemuan Gus Dur dengan A. Syafii Maarif dua hari pasca lengsernya Gus Dur memberikan dampak yang sangat baik untuk menjembatani ketegangan dan mencairkan hubungan NU-Muhammadiyah di tingkat akar rumput (*grassroot*) sebagai imbas dari ketegangan serupa di tingkat elit. Hubungan NU-Muhammadiyah menjadi normal kembali setelah Gus Dur lengser dari jabatan Presiden RI. Hal di atas merupakan salah satu contoh perilaku politik Muhammadiyah yang mencerminkan strategi dakwah kultural dengan tetap berpegang pada prinsip dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Perilaku Politik Muhammadiyah Pada Masa Presiden Megawati Soekarnoputri

Naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur melalui proses yang unik. Hanya beberapa jam setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR, SI MPR pun digelar dengan agenda utama pemungutan suara untuk menolak atau menerima dekrit. Anggota MPR yang hadir sebanyak 601 orang, dan 599 orang di antaranya menolak dekrit. Mandat yang diberikan oleh MPR kepada Gus Dur ditarik kembali, sehingga berakhirilah masa jabatan Gus Dur. Megawati secara otomatis naik menjadi Presiden karena posisinya sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Gus Dur. Hamzah Haz kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Megawati (Uchrowi, 2004: 280-281).

Pemerintahan Megawati yang disebut Kabinet Gotong Royong menimbulkan harapan-harapan baru. Jajaran kabinetnya di bidang ekonomi kerap disebut sebagai *dreaming team* (tim yang menjanjikan). Terbukti kurs rupiah terhadap dollar AS mulai merangkak naik. Akan tetapi, tim kabinet Megawati di bidang hukum tidak sekuat tim ekonomi. Peristiwa serangan udara yang meluluhlantakkan dua gedung WTC di New York, AS, pada 11 September 2001 sangat berpengaruh terhadap proses transisi demokrasi di Indonesia yang kian tersendat-sendat. Pemulihan ekonomi tidak kunjung tuntas. Bahkan rupiah bertambah terpuruk sehingga menyentuh level di atas Rp. 10.000,00 per dollar AS (Fatwa, dalam Suara Muhammadiyah, N0. 1, Th. Ke-87, 1-15 Januari 2002: 48-49).

Tampaknya di antara kekuatan politik yang ada di DPR dan MPR, sebagian besar berkomitmen ingin mempertahankan Megawati sebagai Presiden RI hingga tahun 2004. Terutama, dimotori oleh Fraksi PDI-P, P. Golkar, dan TNI/POLRI. MPR sendiri pada bulan Agustus 2002 sukses menggelar Sidang Umum (SU) yang menetapkan selesainya amandemen UUD 1945.

Pada 12 Oktober 2002 terjadi peristiwa Bom Bali, yakni pengeboman yang terjadi di Legian Kuta Bali dengan korban ratusan orang tewas dan luka-luka. Peristiwa ini, oleh pemerintah, langsung dikaitkan dengan kelompok Islam garis keras (teroris) yang kemudian diidentifikasi dengan JI (*Jamaah Islamiyah*), di mana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir belakangan dituduh sebagai Amir JI dan akhirnya ditahan hingga sekarang. Dua hari setelah terjadinya peristiwa Bom Bali, PP Muhammadiyah langsung mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanda bahwa Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi perdamaian dan anti-kekerasan.

Dalam tahun 2003, ada tiga contoh mengenai perilaku politik Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah bersikap proaktif dan responsif terhadap problematika sosial-politik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. *Pertama*, pada 5 Maret 2003 PP Muhammadiyah menyelenggarakan seminar nasional dengan tema "Resolusi Konflik dan Integrasi Nasional". Seminar yang menghadirkan tiga pembicara (Chusnul Mar'iyah, Lambang Triyono, dan Azyumardi Azra) memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut membantu memecahkan persoalan bangsa, terutama soal disintegrasi bangsa yang tengah berada di ujung tanduk.

Kedua, pada bulan April 2003 PP Muhammadiyah membentuk tim yang akan diterjunkan ke daerah-daerah konflik seperti Aceh, Papua, Maluku dan Poso, guna memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi konflik di beberapa daerah tersebut. Ada dua tim yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah, yakni tim I yang dipimpin oleh Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif, dan tim II yang dikomandani oleh Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin. Tim I diberi tugas mengunjung Nangroe

Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, sedangkan tim II mengunjungi Maluku dan Poso (Suara Muhammadiyah, No. 07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003, pada suplemen hlm. 1).

Ketiga, dalam bulan Oktober 2003, Muhammadiyah bekerjasama dengan NU membuat pernyataan dan gerakan bersama guna memberantas korupsi, salah satu patologi sosial terpenting sebagai biang keladi timbulnya krisis multiwajah di Indonesia. Gerakan bersama yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU untuk memberantas korupsi tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi kedua organisasi kepada negara yang tengah dirundung oleh krisis multiwajah.

Kemudian di sepanjang tahun 2004, ada kecenderungan bahwa perilaku politik Muhammadiyah secara kelembagaan menjurus pada keterlibatan dalam politik praktis, yakni, ketika Muhammadiyah mendukung kader terbaiknya, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, maju sebagai Calon Presiden (Capres) RI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung pada 5 Juli 2004, yang berpasangan dengan Dr. Ir. Siswono Yudhusodo sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Dukungan Muhammadiyah kepada Prof. Dr. H.M. Amien Rais itu bermula dari Keputusan Sidang Pleno PP Muhammadiyah bersama para Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah di Yogyakarta pada 10 Februari 2004 tentang kebijakan Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2004. Inti dari keputusan sidang pleno tersebut adalah pada pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana Muhammadiyah mendukung sepenuhnya langkah-langkah Prof. Dr. H.M. Amien Rais sebagai kader terbaik dan mantan Ketua PP Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004 (Suara Muhammadiyah, No. 05/Th. Ke-89, 1-15 Maret 2004: 2).

Menurut Haedar Nashir, dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais adalah sangat beralasan dan telah dipikirkan secara matang. Pertimbangan utamanya, selain memiliki *track record* yang bersih dan tidak memiliki beban politik masa lampau, Amien Rais juga mempunyai visi kebangsaan yang luas dan tegas, serta dapat melanjutkan agenda reformasi dan penyelamatan bangsa (Suara Muhammadiyah, No. 10, Th. ke-89, 16-31 Mei 2004: 43).

Menurut Abdul Rohim Ghazali, dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais untuk maju sebagai Capres merupakan penyempurnaan dan penjabaran dari Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Bali dan Sidang Tanwir tahun 2003 di Makassar. Selain itu, dukungan tersebut masih sejalan dengan iklim demokrasi yang tengah berkembang pada era Reformasi ini. Bentuk dukungan itu sangat wajar, karena dalam pandangan Muhammadiyah, Amien Rais dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dari pada Capres yang lain, bersih dari KKN, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelangsungan gerakan reformasi (Suara Muhammadiyah, No. 06 Th. ke-89, 16-31 Maret 2004: 36-37).

Berkaitan dengan gagalnya pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo yang didukung oleh Muhammadiyah, menurut Buya Syafii Maarif (wawancara pribadi dengan penulis pada 15 Juli 2004 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta), kegagalan pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo tersebut lebih disebabkan oleh kinerja PAN yang kurang bagus dalam menyosialisasikan Capres-Cawapres yang mereka calonkan. Di beberapa daerah citra anggota legislatif (DPRD) dari PAN sangat jelek, dan bahkan ada yang terlibat kasus KKN seperti yang terjadi di Propinsi Sumatera Barat. Akhirnya yang menjadi korban adalah Amien Rais.

Selanjutnya, dalam pandangan Buya Syafii Maarif, warga Muhammadiyah justru terlihat lebih bersemangat dalam memperjuangkan *Amien Rais for President*, ketimbang warga PAN. Dakwah Muhammadiyah sangat terasa denyutnya hingga tingkat ranting karena ingin mengamankan keputusan PP Muhammadiyah yang mendukung Amien Rais.

Apakah warga Muhammadiyah bulat dalam mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudhohusodo? Hasil survei yang dilakukan oleh dua buah lembaga, LP3ES dan NDI, pada 5 Juli 2004 menunjukkan hanya 54 % warga Muhammadiyah yang memilih pasangan Amien-Siswono. Selebihnya, terdistribusi untuk pasangan SBY-Kalla (21 %), Wiranto-Wahid (13 %), Mega-Hasyim (11 %), dan Hamzah-Agum (2 %). Sedangkan afiliasi organisasi Islam terhadap pasangan Capres-Cawapres, dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 1
Afiliasi Organisasi Islam dan Pasangan Calon

Pasangan Calon	NU	Muhammadiyah	Organisasi Islam lain	Non afiliasi	Total
Wiranto-Wahid	33 %	13 %	20 %	23 %	26 %
Mega-Hasyim	22 %	11 %	13 %	20 %	20 %
Amien-Siswono	11 %	54 %	26 %	20 %	19 %
SBY-Kalla	32 %	21 %	36 %	36 %	33 %
Hamzah-Agum	3 %	2 %	5 %	2 %	3 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : (Suplemen “Mengambil Hikmah dari Kekecewaan Pilpres untuk Kepentingan Dakwah Muhammadiyah”, dalam Suara Muhammadiyah, No, 15, Th-ke 89, 1-15 Agustus 2004: 5).

Dalam Pilpres Putaran II yang berlangsung pada 20 September 2004, hanya tinggal dua pasangan yang bertarung untuk memperebutkan R I, yakni Megawati-

Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Mohammad Joesoef Kalla (SBY-Kalla). Akhirnya, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi tersingkir karena hanya meraih 39 % suara, sementara SBY-Kalla yang memperoleh 61 % suara telah memenangkan perebutan kursi Presiden RI untuk masa jabatan 2004-2009. Pada 20 Oktober 2004, secara resmi pasangan SBY-Kalla telah dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, berakhirilah masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.

SIMPULAN

Paradigma politik Muhammadiyah mengacu pada paradigma kultural. Muhammadiyah meyakini bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang harus diwarnai oleh ajaran Islam. Karena Muhammadiyah bukan merupakan kekuatan politik praktis (seperti parpol, misalnya), Muhammadiyah berupaya mempengaruhi kekuasaan (sebagai bagian terpenting dari perjuangan politik) melalui sarana pemberdayaan masyarakat. Berhadapan dengan negara (yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemangku negara), posisi Muhammadiyah adalah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) seraya menjalankan dakwah *amar ma 'ruf* dan *nahi munkar*.

Perilaku politik Muhammadiyah pada masa Presiden Habibie menunjukkan bahwa organisasi ini cenderung bersikap akomodatif dan subordinatif. Muhammadiyah menerima baik kepemimpinan Presiden Habibie yang dapat dianggap sebagai representasi kekuatan politik Islam. Karena Presiden Habibie mantan Ketua Umum ICMI, perilaku politik Muhammadiyah (sebagai salah satu kelompok kepentingan, yang bukan kekuatan politik praktis) kurang menonjol dan tidak begitu tampak.

Perilaku politik Muhammadiyah pada masa Presiden Gus Dur juga menunjukkan fenomena yang mirip dengan masa Presiden Habibie. Perilaku politik Muhammadiyah cenderung menggunakan pola akomodatif dan subordinatif. Muhammadiyah mendukung Presiden Gus Dur, yang selaku mantan Ketua PBNU, juga dapat dinilai sebagai representasi kekuatan politik Islam. Muhammadiyah juga mendukung Poros Tengah yang berhasil menyatukan para politisi Islam di parlemen, sehingga berhasil memperjuangkan Gus Dur duduk sebagai Presiden RI. Muhammadiyah agak *rikuh* dan *pakewuh* untuk menyampaikan kritik-kritik kepada Presiden Gus Dur karena khawatir atas dampak yang ditimbulkan pada arus bawah (*grassroot*). Terbukti, hubungan massa Muhammadiyah dan NU merenggang ketika Presiden Gus Dur dilengserkan dari jabatan Presiden RI oleh MPR, di mana Amien Rais (mantan Ketua PP Muhammadiyah) dianggap oleh sebagian besar massa NU sebagai *king maker* bagi upaya pelengseran Gus Dur tersebut. Oleh karena itu, Muhammadiyah ikut terkena getah politik dari peristiwa pelengseran Presiden Gus Dur, sehingga

amal usaha Muhammadiyah di sebagian dari dua Propinsi (Jawa Timur dan Jawa Tengah) “dirusak” oleh massa NU.

Perilaku politik Muhammadiyah pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri tampak berada pada rel yang benar dengan mengikuti paradigma kultural (strategi Dakwah Kultural), yang berpola kooperatif-kritis tanpa meninggalkan sikap akomodatif. Beberapa contoh dari perilaku politik Muhammadiyah yang semacam itu, misalnya : pernyataan sikap atas terjadinya Bom Bali pada 12 Oktober 2002; pembentukan tim untuk mengatasi konflik sosial di Aceh, Poso dan Maluku; gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menggandeng tangan NU; dan keberanian Ketua PP Muhammadiyah untuk mengkritik Presiden AS, George W. Bush.

Hanya saja, di sepanjang tahun 2004, terdapat kesan bahwa perilaku politik Muhammadiyah sudah agak menyerempet dan lebih condong bergerak pada politik praktis. Hal ini bermula dari dukungan PP Muhammadiyah kepada kader terbaiknya, Prof. Dr. H.M. Amien Rais, agar maju sebagai Capres dalam Pilpres putaran I pada 5 Juli 2004, kendatipun dalam Pemilu Legislatif pada 5 April 2004 partainya (PAN) hanya meraih 6,44 % suara. Akan tetapi, dukungan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari partisipasi dan kontribusi Muhammadiyah untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang masih terkena krisis multiwajah, serta agar reformasi untuk terciptanya kehidupan yang demokratis, berkeadilan dan berkeadaban dapat berlangsung dengan benar. Dari lima Capres yang berlaga, dalam pandangan Muhammadiyah, Amien Rais adalah yang relatif paling bersih dari dosa-dosa KKN, dapat dipercaya, dan kompeten untuk melanjutkan perjuangan tegaknya reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Berita Resmi Muhammadiyah / BRM, No. 01 / 2000 – 2005.

Berita Resmi Muhammadiyah / BRM, No. 02/2002.

Cipto, Bambang. 2000. “Politik Islam Era Gus Dur: Antara Mitos dan Realitas”, dalam *UNISIA*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UII Yogyakarta. Nomor 41/XII/IV/2000

_____. “Partai-Partai Islam dan Pemilihan Presiden 2004”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 1, Th. Ke-87, 1-15 Januari 2002.

Fatwa, A.M. “Konsolidasi Gerakan Reformasi untuk Demokratisasi”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 1, Th.Ke-87, 1-15 Januari 2002

Gaffar, Afan. “Berkurban Demi Muhammadiyah”, Pengantar dalam M. Amien Rais. 1995. *Moralitas Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Dinamika.

Ghazali, Abd. Rohim. “Membaca Dukungan Resmi Muhammadiyah”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 06 Th. ke-89, 16-31 Maret 2004

Irianto, Heru dan Burhan Bungin. 2001. “Pokok-pokok Penting tentang Wawancara”, dalam Bungin, Burhan (ed.). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ulumul Qur'an. No. 2. Vol. VI. 1995.

Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percatutan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.

_____. 2000. “Hubungan Muhammadiyah dan Negara (Tinjauan Teologis)”, dalam *Media Inovasi*, No. 2 Th. X/2000: 9).

_____. 2002. “Dakwah Kultural Mencerahkan Bangsa”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 2, Th. Ke-87, 16-31 Januari 2002.

_____. 2003. “Kritik Pak Syafii kepada Bush”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 22, Th. ke-88, 16-30 November 2003

_____. 2004. *Wawancara* penulis dengan Beliau pada 15 Juli 2004 di Gedung Kantor PP Muhammadiyah yang baru, Jl. Cik Di Tiro, Yogyakarta.

Media Inovasi, Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam edisi nomor 2 tahun X/2000.

Nashir, Haedar. “Muhammadiyah Salah Langkah?”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 15 Th. ke-89, 1-15 Agustus 2004

Rais, M. Amien. 1995. *Moralitas Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Dinamika.

- _____. 1998. *Membangun Politik Adiluhung Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Diedit oleh Idi Subandy Ibrahim. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- _____. “Enam Ajakan Muhammadiyah”. dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 13, Th.ke-83, 1-15 Juli 1998
- Suara Muhammadiyah*, 1998. No. 11, Th. Ke-83.
- Suara Muhammadiyah*, No. 07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003
- Suara Muhammadiyah*, No. 05/Th. Ke-89, 1-15 Maret 2004
- Suharsono. 1999. *Cemerlangnya Poros Tengah*. Jakarta: Perennial Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwarno. 2002. *Muhammadiyah sebagai Oposisi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsuddin, M. Din. 1995. “The Muhammadiyah Da’wah and Allocative Politics in the New Order”, dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*. Vol 2, No. 2, 1995.
- Thohari, Hajriyanto Y., “Politik Islam: Bukan Jargon Masa Depan”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 05, Th.K3-88, 1-15 Maret 2003
- Uchrowi, Zaim. 2004. *Mohammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani. An Authorized Biography*. Jakarta: Teraju.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Woshinsky, Oliver H. 1995. *Culture and Politics An Introduction to Mass and Elite Political Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.